



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TRIWULAN III 2019



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN 2019





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. UMUM	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. RUANG LINGKUP	2
D. DASAR HUKUM	2
BAB II PELAKSANAAN TUGAS	3
A. DIVISI ADMINISTRASI	3
B. DIVISI PEMASYARAKATAN	28
C. DIVISI KEIMIGRASIAN	32
D. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	36
BAB III PENUTUP	50
A. SIMPULAN	50
B. SARAN	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kegiatan Penyusunan Program	3
Tabel 2 Kegiatan Peliputan	4
Tabel 3 Penyelenggaraan Kehumasan	15
Tabel 4 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 5 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	18
Tabel 6 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Tabel 7 Jumlah Kebutuhan Pegawai	21
Tabel 8 Realisasi Anggaran Hingga Triwulan II (Januari s.d. Juni) Tahun 2019.....	24
Tabel 9 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Hingga Triwulan II	28
Tabel 10 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	28
Tabel 11 Data Napi/Narapidana pada Satuan Kerja	29
Tabel 12 Data Pemberian PB,CB, dan CMB	30
Tabel 13 Keadaan Klien Pemasarakatan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 14 Pemberian Paspor RI.....	32
Tabel 15 Pelayanan ITAS/ITAP	33
Tabel 16 Data Lalu Lintas Tempat Pemeriksaan Imigrasi	33
Tabel 17 Pengungsi di Dalam Rudenim.....	34
Tabel 18 Pengungsi di luar Rudenim.....	35
Tabel 19 Jenis Pelayanan Kewarganegaraan	37
Tabel 20 Permohonan HKI.....	37
Tabel 21 Pemberian Bantuan Hukum	37
Tabel 22 Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Bantuan Hukum	38
Tabel 23 Jumlah Pengunjung.....	39
Tabel 24 Data Produk Hukum yang dibahas dan dikaji.....	39
Tabel 25 Data Laporan Komunikasi maupun Informasi	40
Tabel 26 Kajian Permasalahan Hukum dan HAM.....	43
Tabel 27 Daftar Jumlah Notaris di Wilayah Sulawesi Selatan.....	43
Tabel 28 Data Notaris.....	44
Tabel 29 Pelantikan Notaris	44



BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Kantor Wilayah Sulawesi Selatan merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah merupakan perpanjangan tangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kementerian Hukum dan HAM yang mengemban tugas di bidang pembangunan Hukum dituntut untuk mampu mengadakan pembaharuan dibidang Hukum, mengharmonisasi peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mengemban amanah tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan membangun kerjasama dan koordinasi secara Internal dan Eksternal di bidang Pemasarakatan, di bidang Keimigrasian, di bidang Administrasi Hukum Umum, dan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dan di bidang Hukum lainnya.

Dalam pelaksanaannya, diharapkan terwujudnya pelayanan dan kepastian hukum sesuai dengan slogan PASTI REWAKI. Dimana Professional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif, merupakan Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Responsif (mewakili bidang AHU), Empati (mewakili bidang HAM), Wibawa (mewakili bidang Keimigrasian), Aktif (mewakili bidang Pemasarakatan), Komunikatif (mewakili bidang Administrasi), dan Implementatif (mewakili bidang Hukum) merupakan Motto Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

Tuntutan pelayanan di bidang Hukum yang baik tersebut memerlukan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan didukung dengan sarana dan prasarana, serta ketersediaan Anggaran yang memadai, sehingga diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya laporan pelaksanaan tugas Triwulan III Tahun 2019 ini adalah sebagai bahan pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas dan fungsi administratif maupun teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan selama periode bulan Juli s.d. September 2019.



2. Tujuan

Penyusunan laporan ini bertujuan sebagai pedoman dan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada periode akan datang, sehingga setiap permasalahan dan kendala yang ditemui dan dijabarkan pada laporan ini dapat diatasi dan dicegah sebelumnya, sehingga tidak menghambat dan mengganggu jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan ke depannya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan laporan ini adalah seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi baik administratif fasilitatif maupun teknis substantif pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dari seluruh divisi yang ada selama periode bulan Juli s.d. September tahun 2019.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.PR.01.03 tahun 2018 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.



BAB II PELAKSANAAN TUGAS

A. DIVISI ADMINISTRASI

1. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan.

Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Berikut kegiatan yang dilaksanakan Subbagian Program dan Pelaporan selama Triwulan III Tahun 2019:

Tabel 1 Kegiatan Penyusunan Program dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

NO.	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT PELAKSANAAN
1.	Supervisi Pagu Anggaran RKA-K/L	13-14 Agustus 2019	Aula Kantor Wilayah Sulawesi Selatan
2	Koordinasi dan Penyusunan LKIP Sekretariat Jenderal dan LKIP Kementerian Hukum dan HAM	12-15 Agustus 2019	The Alana Hotel & Convention Center, Sentul Jawa Barat
3	Kegiatan Pendampingan Penyusunan RKA-K/L Satuan Kerja Keimigrasian Tahap II	27-30 Agustus 2019	Hotel Aston, Makassar
4	Supervisi Pagu Alokasi Anggaran RKA-K/L	18-25 September 2019	Graha Pengayoman, Jakarta

Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi

Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.



Tabel 2 Kegiatan Peliputan

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan hadir pembukaan Rapat Kolaborasi Pengendalian Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2019 di The Sultan Hotel – Jakarta.	1-3 Juli 2019
2	Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Daya Saing Produk dan Legalitas Usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Denpasar.	2 Juli 2019
3	Kegiatan self assessment jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada Kegiatan Rapat Kolaborasi Pengendalian Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2019 di The Sultan Hotel – Jakarta.	2 Juli 2019
4	Pembahasan Action Plan Target Kinerja B09 dan B12 Kantor Wilayah yang diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah dan para Kepala Divisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada Rapat Kolaborasi Pengendalian Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2019 di The Sultan Hotel – Jakarta.	3 Juli 2019
5	Kepala Bidang Pelayanan Hukum menghadiri Rapat Kolaborasi Pengawasan Direktorat Resort Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Penyidik Kepolisian RI dan PPNS Instansi, Kantor Wilayah, Balai dan Dinas Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan di Hotel Dalton Makassar.	4 Juli 2019
6	Kepala Bidang Pelayanan Hukum mewakili Kepala Kantor Wilayah hadir kegiatan sosialisasi pengajuan HKI yang di selenggarakan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Makassar.	5 Juli 2019
7	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel melaksanakan kegiatan Peta Permasalahan Hukum dirangkaikan dengan kegiatan Inventarisasi, Klasifikasi, dan Pemetaan Perda/Ranperda di Kab. Sinjai.	5 Juli 2019
8	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM SulSel bersama para Kepala Divisi Kabag PH dan Kasubag Humas lakukan kunjungan kerja ke BPKP perwakilan Sulawesi Selatan.	8 Juli 2019
9	Kakanwil dan Kadiv Administasi melakukan Dialog Interaktif dalam acara Hallo Listener di Radio Venus Makassar.	8 Juli 2019
10	Kanwil Sulsel rintis kerjasama dengan STIA LAN Makassar. Kakanwil bersama para Kadiv menerima kunjungan petinggi STIA LAN Makassar di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel.	8 Juli 2019
11	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel bersama dengan para Kepala Divisi lakukan kunjungan kerja ke BPKP perwakilan Sulawesi Selatan.	9 Juli 2019
12	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel memimpin Rapat Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah di ruang rapat pimpinan.	9 Juli 2019
13	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, memeriksa kesiapan dan persiapan aparat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kloter 4 (empat) melalui Embarkasi/Debarkasi Makassar Tahun 1440H di Asrama Haji Sudiang.	9 Juli 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
14	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Kadiv Administrasi dan Kadiv Imigrasi membuka kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA 2019.	9 Juli 2019
15	Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM pimpin Rapat Koordinasi dan Klarifikasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.	9 Juli 2019
16	Kolaborasi dan Sinergi dalam Perayaan Bhayangkara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel hadir upacara Peringatan HUT ke-73 Bhayangkara Polri yang dilaksanakan di Lapangan Karebosi.	11 Juli 2019
17	Kakanwil apresiasi penggunaan E-Card dan Aplikasi Selling Service di Rutan Pinrang, WBP di Rutan Pinrang sudah menggunakan E-Pas Card sebagai alat pembayaran.	11 Juli 2019
18	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melakukan Dialog Interaksi dalam acara Hallo Listener di Radio Venus Makassar.	11 Juli 2019
19	Kadiv Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulsel yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, buka kegiatan internalisasi SOP administrasi pemerintah dengan pemateri dari Ditjen Imigrasi di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel.	11 Juli 2019
20	Kakanwil dan para Kadiv melakukan kunjungan penguatan Pembangunan ZI di Rutan Kelas IIB Pinrang.	11 Juli 2019
21	Kakanwil dan para Kadiv melakukan kunjungan penguatan Pembangunan ZI di Rutan Kelas IIB Enrekang.	12 Juli 2019
22	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel di damping Kadiv Pemasyarakatan, Kadiv Administrasi dan Kadiv Yankum serta rombongan Kanwil memberikan Penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada seluruh pegawai Rutan Kelas IIB Enrekang.	12 Juli 2019
23	Enrekang terkait dengan pembinaan Narapidana dan dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Muslim Bando dan Kakanwil terkait Pembinaan Kemandirian bagi WBP dan Pembentukan Perda di Gedung Pola Bupati Enrekang.	12 Juli 2019
24	Kakanwil kembali melakukan kunjungan kerja ke beberapa UPT yang tahun ini belum diusulkan untuk memperoleh predikat tersebut, yaitu Rutan Kelas IIB Sidrap dan Rutan Kelas IIB Enrekang setelah melakukan peninjauan dan pengecekan terkait fasilitas yang ada khususnya fasilitas Pelayanan Publik berbasis HAM.	12 Juli 2019
25	Kakanwil melakukan pemantauan terhadap fasilitas pelayan publik di Kanim Parepare dan memimpin rapat dengan seluruh pegawai, guna melakukan evaluasi dan penguatan WBK.	12 Juli 2019
26	Kakanwil bersama Kadiv Pas kembali melakukan Dialog Interaktif dalam acara Hallo Listener di Radio Venus Makassar, Dialog ini membahas terkait Pelayanan Umum Kemenkumham Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.	15 Juli 2019
27	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel menerima kunjungan Direktur Politeknik Imigrasi, Anggiat Napitupulu bersama rombongan di ruang Kakanwil.	15 Juli 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
28	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, pimpin apel pagi dan lakukan pemeriksaan atribut kelengkapan pakaian, dalam rangka meningkatkan disiplin bagi pegawai Kantor Wilayah.	15 Juli 2019
29	Pengarahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel terkait Perkembangan ZI di Kanwil. Rapat ini dihadiri oleh jajaran Kepala Divisi, Pejabat Struktural, dan seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Sulsel.	15 Juli 2019
30	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, melantik dan mengambil sumpah jabatan 5 (lima) orang PPNS dan 5 (lima) orang Notaris Pengganti di Aula Kanwil.	16 Juli 2019
31	Kakanwil melakukan Pemantauan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Bapas Kelas I Makassar.	16 Juli 2019
32	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, menerima kunjungan kerja dari Tim Evaluasi atas kinerja penggunaan anggaran pada Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar.	16 Juli 2019
33	Antisipasi datangnya musim kemarau, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar bangun penampungan air untuk pemenuhan kebutuhan dasar WBP sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel.	17 Juli 2019
34	Kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel ke Kota Palopo diselingi pertemuan dengan Kepala Bandar Udara (Bandara) Lagaligo Bua Palopo.	18 Juli 2019
35	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel menghadiri Bimbingan Lanjutan Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo.	18 Juli 2019
36	Tim Yankomas Kanwil Sulsel Mediasi Masyarakat Adata Tana Toraja.	19 Juli 2019
37	Sambut kedatangan Tim Penilaian Eksternal Kemenpan RB, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel memberikan arahan kepada seluruh jajarannya terkait Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi pegawai untuk mencapai Predikat ZI menuju WBK/WBBM.	19 Juli 2019
38	Sambut kedatangan Tim Penilaian Eksternal Kemenpan RB di Kanwil. Kakanwil didampingi Kadiv Pemasyarakatan dan Kabag Umum tinjau pejabat dan pegawai diruang kerja masing-masing Divisi dan memerikasa layanan publik.	19 Juli 2019
39	Sambut kedatangan Tim Penilaian Eksternal Kemenpan RB di Lapas Kelas I Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel memberikan arahan kepada seluruh jajarannya terkait Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi pegawai untuk mencapai Predikat ZI menuju WBK/WBBM.	19 Juli 2019
40	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, meninjau langsung kebersihan blok hunian WBP dan sarana prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.	19 Juli 2019
41	Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi dan Target Prioritas oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel.	19 Juli 2019
42	Dalam rangka kedatangan Tim Penilaian Eksternal Kemenpan RB di Rutan Kelas I Makassar, Kakanwil beri arahan kepada pejabat dan pegawai terkait Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi pegawai untuk mencapai predikat ZI menuju WBK/WBBM.	19 Juli 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
43	Tim Yankomas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel gelar rapat koordinasi dan klarifikasi dugaan pelanggaran HAM, bertempat di ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja.	20 Juli 2019
44	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, sebagai narasumber dalam FGD Restoratif Justice dengan tema "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di wilayah Kota Makassar" yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Hotel Four Point Makassar.	22 Juli 2019
45	Layanan Keimigrasian menuju pembangunan Zona Integritas Makassar. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, kembali melakukan dialog di Radio Venus dalam acara Hallo Listener.	22 Juli 2019
46	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, pimpin rapat koordinasi Action Plan tindak lanjut Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di ruang rapat pimpinan.	22 Juli 2019
47	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan saat memimpin rapat evaluasi penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi rencana kedatangan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan HAM RI, Razilu bersama tim dalam rangka Penguatan kembali Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	22 Juli 2019
48	Hadiri penutupan Forum Anak Nasional Wujud Sinergitas Kanwil Sulsel Makassar. Kakanwil Kemenkumham Sulsel hadiri acara penutupan Forum Anak Nasional Tahun 2019 di Benteng Rotterdam.	22 Juli 2019
49	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, bersama dengan jajaran Kepala Divisi pimpin Rapat Pembahasan Penyesuaian RKA-KL Pagu Indikatif 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Aula yang diikuti oleh pejabat eselon III, IV dan operator RKA-KL.	23 Juli 2019
50	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan HAM RI langsung menuju Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk meninjau progress Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bersama jajaran Kepala Divisi dan KaUPT dalam Kota, Staf Ahli Menteri meninjau beberapa fasilitas pelayanan Kanim Kelas I Makassar dalam upaya mewujudkan satuan kerja berpredikat WBK di Tahun 2019.	24 Juli 2019
51	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Kepala Bidang Litbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, mengadakan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah beserta jajaran Kepala Divisi dan KaUPT Kota Makassar beserta Tim Pokja Pembangunan ZI pada Entry Meeting jelang penguatan kembali Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM kerjasama Kemenkumham dan Cegah-USAID.	24 Juli 2019
52	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan HAM RI, bersama Kepala Kantor Wilayah, jajaran Kepala Divisi dan KaUPT Kota Makassar lakukan kunjungan kerja ke Kanim Kelas I TPI Makassar.	24 Juli 2019
53	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi pimpin apel pagi di Lapas Makassar. Staf Ahli didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sekaligus beri pengarahan dan penguatan terhadap seluruh pegawai Lapas Kelas I Makassar.	25 Juli 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
54	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan akan melakukan kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Hal ini disampaikan saat Kepala Kantor Wilayah melakukan pertemuan dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya UMI, Prof. Dr. H. Syahnur Said, SE., MS di Gedung Rektorat UMI.	25 Juli 2019
55	Kegiatan Entry Meeting Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Kepala Bidang Litbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam rangka Penguatan kembali Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM kerjasama Kemenkumham dan cegah USAID untuk Wilayah Sulawesi Selatan.	25 Juli 2019
56	Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sulsel gelar briefing dengan para Kepala UPT Pemasarakatan di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel.	25 Juli 2019
57	Anggota Tim Penguatan kembali Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM kerjasama Kemenkumham dan Cegah USAID saat meninjau sarana dan prasarana fasilitas penunjang sebagai salah satu penilaian komponen hasil guna peningkatan kualitas pelayanan publik.	26 Juli 2019
58	Tim Penguatan kembali Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM kerjasama Kemenkumham dan Cegah USAID untuk wilayah Sulsel melakukan pendampingan dan evaluasi rekomendasi hasil penilaian Tim Penilaian Internal kepada Tim okja Pembangunan ZI di Kantor Wilayah.	26 Juli 2019
59	“Sinergitas, Kolaborasi, dan Gotong Royong untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat menjadi suatu kewajiban kita dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan Negara.	29 Juli 2019
60	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, buka kegiatan Rapat Presentasi Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian terhadap karakteristik Narapidana Kasus Narkotika di Sulawesi Selatan oleh bidang HAM di Ruang Rapat Kakanwil.	29 Juli 2019
61	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, beri pengarahan kepada seluruh pegawai Lapas Takalar terkait Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.	30 Juli 2019
62	Dalam rangka percepatan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, lakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIB Takalar guna memantau dan melakukan evaluasi fasilitas pelayanan publik didampingi Kepala Divisi Administrasi dan beberapa Pejabat Eselon III Kantor Wilayah.	30 Juli 2019
63	Kepala Kantor Wilayah, Priyadi bersama Kepala Divisi Administrasi, Abd. Rahman dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Amru Walid serta pejabat eselon III Kantor Wilayah melakukan Kunjungan Kerja ke Rutan Kelas IIB Soppeng.	1 Agustus 2019
64	Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel, Basir mewakili KaKakanwil membuka kegiatan Evaluasi Penggunaan, Pemanfaatan BMN dan Pengelolaan Rumah Negara yang diselenggarakan oleh dari Biro BMN di Aula Kanwil Sul Sel	1 Agustus 2019
65	Kepala Divisi Imigrasi, Kaharuddin mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sul Sel terima Plakat dari Mahasiswa yang telah melaksanakan internship di Kantor Wilayah	3 Agustus 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
66	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sul Sel memimpin Panwasda OBH melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuaab Hukum di Kab. Pinrang	6 Agustus 2019
67	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Parepare menjadi tuan rumah penyelenggaraan Jambore Anak Sejahtera Tahun 2019 yang diikuti oleh Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) dari 24 Satuan Kerja Pemasarakatan Lingkup Kementerian Hukum dan Sulawesi Selatan	6 Agustus 2019
68	Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah memberikan penguatan Tugas dan Fungsi Percepatan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar	6 Agustus 2019
69	Tim Penyuluh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel melakukan Penyuluhan Hukum bagi pelajar SMP Metro School Makassar	7 Agustus 2019
70	Seluruh Staf Kanwil Kemenkum Ham Sul Sel ikuti Senam Pagi yang diselenggarakan di Lapangan Kanwil	8 Agustus 2019
71	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sul Sel bersama Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah beserta Tim Kanwil Sul Sel memimpin Panwasda OBH melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kab. Bulukumba.	8 Agustus 2019
72	Tim Sekretariat Pembanguna Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor wilayah memeriksa pemutakhiran data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dari Tim Kelompok Kerja (Pokja) pada masing-masing 6 (enam) Area Perubahan yang terdapat dalam komponen pengungkit	8 Agustus 2019
73	Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel sembelih 10 (sepuluh) ekor sapi sebagai hewan qurban pada Hari Raya Idul Adha 1430 H di Halaman Kanwil	11 Agustus 2019
74	Audensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel, Priyadi bersama jajaran Eselon II dan III, terkait Tingkatkan Publikasi dan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel bertempat Media Kompas Makassar	12 Agustus 2019
75	Dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-K/L) hasil penelitian Pagu Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 dan penelahaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Sulsel laksanakan kegiatan Supervisi RKA-KL di Aula Kantor Wilayah.	13 Agustus 2019
76	Kasubid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Sulsel, bersama tim lakukan kegiatan pengambilan data peta permasalahan hokum penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone dan tata kelola pemerintahan yang baik di Bagian Hukum Pemkab Bone.	13 Agustus 2019
77	Kakanwil Kemenkumham Sulsel bersama jajaran melakukan kunjungan ke BPS Provinsi Sulsel dalam rangka koordinasi persiapan survei hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di	13 Agustus 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
	Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel.	
78	Wawancara Kepala Kantor Wilayah bersama pemersatu bangsa TVRI Prov Sulsel dengan mengangkat topic pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	13 Agustus 2019
79	Dalam rangka menyambut peringatan HUT RI ke-74, Kanwil Kemenkumham Sulsel menyelenggarakan pertandingan olahraga antar pegawai UPT di Lapas Kelas I Makassar.	14 Agustus 2019
80	Dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-K/L) hasil penelitian Pagu Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 dan penelahaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Biro Perencanaan Sekjen Kemenkumham RI bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Sulsel laksanakan kegiatan Supervisi RKA-KL di Aula Kantor Wilayah.	15 Agustus 2019
81	Kakanwil bersama Kadiv Imigrasi dan Kakanim Makassar serta beberapa pejabat structural yang ikut mendampingi meninjau lokasi dan dilanjutkan dengan Taping(rekaman) bersama Kompas TV Makassar dalam acara "Sapa Sulsel" mengangkat tema "Pembangunan ZI diwilayah Sulsel".	16 Agustus 2019
82	Peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-74, Kanwil Kemenkumham Sulsel menggelar Upacara Bendera di Rutan Kelas I Makassar	17 Agustus 2019
83	Kakanwil Kemenkumham Sulsel bersama Kadiv Keimigrasian dan Kakanim Makassar serta beberapa pejabat structural yang ikut mendampingi meninjau lokasi yang rencananya akan dibangun tempat ULP di Phinisi Point Mall Makassar.	17 Agustus 2019
84	Kakanwil Kemenkumham Sulsel bersama Kadiv Pemasaryakatan dan Kalapas Kelas IIA Maros menerima Lencana Pancawarsa Pramuka dari Gubernur Provinsi Sulsel.	17 Agustus 2019
85	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kemenkumham RI beri masukan Kepada Tim Pembangunan ZI Kanwil sebelum mengikuti Desk Evaluasi oleh Tim Penilai dari Kemen PAN-RB RI di Jakarta.	21 Agustus 2019
86	Kepala Divisi Pemasaryakatan Kanwil Sulsel memberikan penguatan tugas pokok dan fungsi bagi petugas Pemasaryakatan serta pengarahan di depan WBP di Lapas Narkotika Sungguminasa dan Lapas Perempuan Sungguminasa.	26 Agustus 2019
87	Kanwil Kemenkumham Sulsel melakukan Penguatan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bagi 7(tujuh) Satuan Kerja yang diusulkan pada kegiatan "Entry Meeting" survey hasil pelaksanaan RB Tahun 2019 oleh Kepala BPS Prov Sulsel Yos Rusdiansyah.	27 Agustus 2019
88	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Priyadi buka kegiatan Konsolidasi Rutin dengan tajuk Forum Restorative Justice Kota Makassar. Kegiatan ini merupakan hasil dari kolaborasi antara Lapas Kelas I Makassar, Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).	27 Agustus 2019
89	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Priyadi hadiri kegiatan pendampingan penyusunan RKA-KL satuan kerja Keimigrasian Tahun Anggaran 2020 tahap II yang diselenggarakan oleh Dirjen Imigrasi di Hotel Aston Makassar.	27 Agustus 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
90	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Sulsel gelar kegiatan Sosialisasi Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan berbasis Online bertempat di Hotel Gammara Makassar.	27 Agustus 2019
91	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Priyadi buka kegiatan Diseminasi Perlindungan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual yang bertemakan "Dengan Perlindungan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, kita wujudkan Kepastian Hukum bagi masyarakat dan Pelaku Usaha".	28 Agustus 2019
92	Tim Persatuan Tennis Pengayoman (PTP) Kanwil Sulsel meraih Juara ke-III pada Turnamen Tennis PTP 2019 di Gelora Manahan Solo – Jawa Tengah.	31 Agustus 2019
93	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, melaksanakan acara serah terima jabatan Kalapas Kelas I Makassar dan Dilanjutkan pisah sambut Kadiv Administrasi dan Kadiv Yankum.	4 September 2019
94	Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar resmi berganti dari Budi Sarwono ke Robianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Pelta, kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada ditandai dengan acara 'antar tugas Kalapas Kelas I Makassar' bertempat di Aula Lapas Jalan Sultan Alauddin Makassar.	4 September 2019
95	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Priyadi bersama Pejabat Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb hadir petakan batu pertama pembangunan Vihara di Lapas Kelas I Makassar.	4 September 2019
96	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Priyadi didampingi Kadiv Yankum terima audeiensi dari Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (P2KUKM) Kabupaten Luwu Utara, Muhammad Kasrum Patawari bersama Kabid Perindustrian di Ruang Kepala Kantor Wilayah.	5 September 2019
97	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Priyadi adakan rapat Evaluasi bersama dengan para pimiti pratama, para pejabat administrasi dan perwakilan dan pejabat fungsional tertentu Kantor Wilayah di ruang rapat Kakanwil.	5 September 2019
98	Kakanwil inginkan komitmen pegawai terus terjaga, kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Priyadi pimpin apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai di pelataran Kantor Wilayah.	5 September 2019
99	Apel pagi rutin jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, bertidak selaku Pembina apel Rudi Sarjono, Kepala Bidang Pelta, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan.	6 September 2019
100	Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Sirajuddin mewakili Kepala Kantor Wilayah hadir kegiatan Upacara Peepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinana Nasional Tingkat II angkatan IX Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan KAjian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara RI di Aula Hasanuddin Kantor Pustalbang KMP LAN.	6 September 2019
101	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Sri Yuliani pimpin Rapat Pencapaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Persiapan Penyusunan Laporan B09.	9 September 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
102	Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Kaharuddin pimpin apel pagi, Kaharuddin dalam amanatnya berharap kepada seluruh Pegawai untuk tetap menjaga komitmen dan konsisten dalam mengawal WBK dilingkungan Kantor Wilayah.	9 September 2019
103	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Priyadi buka kegiatan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel Tahun Anggaran 2019 di Aula Kanwil.	10 September 2019
104	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Priyadi adakan rapat internal bersama Jajaran Divisi Pemasarakatan di ruang rapat Kakanwil. Pada rapat ini Kakanwil menyampaikan 4 point penting dan yang paling penting adalah menjaga komunikasi di internal kita sendiri.	10 September 2019
105	Pimpin apel pagi, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Sirajuddin bersama Kepala Divisi Pemasarakatan dan kepala Divisi Keimigrasian lakukan pengecekan atribut.	11 September 2019
106	Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Taufiqurrahman berikan pengarahan kepada kepala UPT beserta pejabat structural Pemasarakatan disekitaran Kota Makassar dan JFT Pemasarakatan Kantor Wilayah di Aula Kanwil.	11 September 2019
107	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel hadir pengukuhan Guru Besar Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Yasonna H. Laoly, SH., M.Sc., Ph. D oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Gedung Auditorium Mutiara STIK PTIK, Jakarta.	12 September 2019
108	Apel pagi Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran, dan Keamanan, Rudi Sarjono sekaligus untuk memanjatkan do'a bersama bagi mendiang Presiden RI yang ke-3 Almarhum B.J. Habibie yang telah wafat.	12 September 2019
109	Sinergi Kanwil Kemenkumham Sulsel dan Pemda Bulukumba dala Penyusunan NA Raperda Pembangunan Industri Kabupaten Bulukumba.	12 September 2019
110	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel kembali memperkuat sineritas dengan pemerintah Kota Makassar, kali ini melalui kegiatan sosialisasi terkait syarat dan tatacara pelaksanaan bantuan hokum gratis yang dilaksanakan oleh Pemkot Makassar di Hotel Same Makassar dengan menggandeng Narasumber Kanwil Sulsel.	12 September 2019
111	Dua Pimpinan Tinggi Pratama tinjau Progres pembangunan Rutan Jeneponto.	12 September 2019
112	Menindaklanjuti arahan Menkumham RI beberapa waktu yang lalu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Priyadi bersama para Kepala Divisi beri pengarahan jajaran Ka.UPT dilingkungan Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel terkait dengan target kinerja B09 yang digelar di Aula Kanwil.	13 September 2019
113	Jelang kegiatan kerja bakti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Kepala Bagian Umum pimpin apel pagi seluruh pegawai.	13 September 2019
114	Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Sirajuddin pimpin langsung kegiatan kerja bakti dilingkungan Kantor Wilayah.	13 September 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
115	Kepala Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel didampingi oleh para Kepala Divisi melaksanakan Coffe Morning di Ruang Sekretariat Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.	13 September 2019
116	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel beri ucapan selamat ulang tahun Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) yang ke-60. Ucapan ini ia sampaikan saat sedang menghadiri kegiatan penyusunan Peraturan Walikota tentang penganganan pengungsi luar negeri di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar melalui lembaga kemitraan UNHCR di Hotel Ibis Makassar.	16 September 2019
117	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Priyadi menjadi narasumber pada kegiatan 'Rapat Koordinasi Penyusunan Peratiran Walikota tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Makassar' yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda) Kota Makassar melalui lembaga kemitraan UNHCR di Hotel Ibis Makassar.	16 September 2019
118	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Priyadi melantik dan mengambil sumpah 49 orang Pejabat Fungsional Tertentu Analisis Keimigrasian dan 3 Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Aula Kantor Wilayah.	16 September 2019
119	Dalam rangka meningkatkan kolaborasi eksternal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi lakukan kunjungan kerja ke Bupati Luwu Utara, Indah Dwi Putri Indriani di Kantor Bupati Luwu Utara.	16 September 2019
120	Dalam rangka mewujudkan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online dan Kekayaan Intelektual (KI) yang PASTI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan gelar Sosialisasi AHU Online di Kantor Bupati Luwu Utara.	17 September 2019
121	Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melakukan kunjungan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Luwu Utara tepatnya di Kota Masamba.	18 September 2019
122	Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik berbasis HAM yang merupakan kriteria utama dalam mendorong percepatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Kepala Kantor Wilayah melakukan kunjungan kerja di Kantor Imirasi Kelas III Palopo.	18 September 2019
123	Kakanwil terima Kunjungan Tim dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI terkait pelaksanaan kegiatan Koordinasi Teknis Persiapan Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik disingkat Alegtron pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.	19 September 2019
124	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan kedatangan Tim Penilai dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan yang akan melakukan penilaian terhadap kesiapan Kantor Wilayah menuju ZI untuk WBK/WBBM.	19 September 2019
125	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi buka kegiatan koordinasi teknis persiapan desentralisasi Layanan Aplikasi Legalisasi Elektronik disingkat ALEGTRON di Aula Kantor Wilayah.	19 September 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
126	Kakanwil bersama jajaran Kepala Divisi terima Kunjungan Tim Penilai dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan terkait pelaksanaan Pembanguna ZI menuju WBK/WBBM.	19 September 2019
127	Pelaksanaan verifikasi analis jabatan dan evaluasi jabatan structural oleh Tim dari Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI.	19 September 2019
128	Kegiatan rutin senam pagi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.	20 September 2019
129	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi hadiri Konferensi wilayah dan penyegaran pengetahuan pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) wilayah Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar.	21 September 2019
130	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Sri Yuliani pimpin apel pagi.	23 September 2019
131	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi bersama Jajaran Kepala Divisi menyelenggarakan rapat bersama Kepala UPT di Aula Kantor Wilayah.	23 September 2019
132	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, ikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan penggunaan Aplikasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM Unggul (SI PaSTIKU) melalui Video Conference di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel.	23 September 2019
133	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Sri Yuliani terima kunjungan Tim Survey Eksternal dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan di ruang Pelayanan KI.	23 September 2019
134	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Divisi Pemasarakatan beri penguatan Tugas dan Fungsi kepada jajaran Ka.UPT dan beberapa Pejabat Struktural dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sulsel.	23 September 2019
135	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Friedrich Naumann Foundation For Freedom Indonesia gelar kegiatan seminar 'Internet Sehat dan Pencegahan Ujaran Kebencian' di Aula Fakultas Hukum UMI.	24 September 2019
136	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi didampingi Kepala Divisi Administrasi, Sirajuddin hadiri pelantikan 85 orang anggota DPRD Prov. Sulsel Periode 2019-2024 di gedung paripurna lantai tiga DPRD Prov. Sulsel.	24 September 2019
137	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi melakukan kunjungan kerja di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH-UMI).	24 September 2019
138	Kepala Kantor Wilayah, Priyadi bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Sri Yuliani menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi/desiminasi rencana aksi Nasional HAM Tahun 2019 di Aula Dinas Ketenagakerjaan Pemda Jeneponto.	26 September 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
139	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi gelar briefing dengan pegawai Rutan Kelas IIB Bantaeng di Ruang Kepala Rutan.	26 September 2019
140	Kepala Kantor Wilayah melakukan inpeksi mendadak (Sidak) di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Takalar.	26 September 2019
141	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Priyadi didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Yuliani beri arahan dalam raat konsultasi teknis terkait rencana kerja dan anggaran pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Tahun 2020 di Ruang Rapat Kakanwil.	27 September 2019
142	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Yuliani mewakili Kepala Kantor Wilayah menjadi narasumber dalam kegiatan Seminar Pendidikan Nasional dengan tema Peran Pendidikan dalam menghadapi tantangan Rasisme. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar di Menara Phinisi UNM.	28 September 2019
143	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi pimpin apel pagi jajaran pegawai Kanwil Kemenkumham Sulsel.	30 September 2019

Sumber : Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi , data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

Tabel 3 Penyelenggaraan Kehumasan

NO.	KEGIATAN
1	Pembuatan Spanduk, Banner dan Media Informasi Lain terkait Kegiatan dan Program yang ada pada Kantor Wilayah
2	Peliputan dan Publikasi Berita terkait Kegiatan Kantor Wilayah

Sumber : Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi , data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga. Adapun keadaan kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan disampaikan pada tabel berikut:



Tabel 4 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT/SATKER	JUMLAH PEGAWAI				TINGKAT PENDIDIKAN									JML
		GOLONGAN				SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
		IV	III	II	I										
1	Kanwil	25	119	30	-	-	-	34	-	-	7	92	41	-	174
2	LP Makassar	9	74	64	-	-	-	77	-	-	9	49	12	-	147
3	LP Watampone	4	62	51	-	-	-	75	-	-	2	29	11	-	117
4	LP Pare-pare	3	27	38	-	-	-	44	-	-	-	19	5	-	68
5	LP Bulukumba	3	49	33	-	-	-	44	-	-	2	39	2	-	85
6	LP Narkotika	3	48	73	-	-	-	71	-	-	5	42	6	-	124
7	LP Maros	3	39	42	-	-	-	46	-	-	2	30	6	-	84
8	LP Palopo	2	40	41	-	-	-	55	-	-	3	23	2	-	83
9	Bapas Makassar	11	65	6	-	-	-	6	-	-	2	58	16	-	82
10	Bapas Watampone	2	43	11	-	-	-	17	-	-	1	35	3	-	56
11	Bapas Palopo	1	18	2	-	-	-	5	-	-	-	15	1	-	21
12	Rutan Makassar	6	96	77	-	-	-	96	-	-	2	72	9	-	179
13	Rutan Barru	2	19	21	-	-	-	21	-	-	-	18	3	-	42
14	Rutan Enrekang	-	20	16	-	-	-	25	-	-	1	8	2	-	36
15	Rutan Makale	1	16	18	-	-	-	28	-	-	-	6	1	-	35
16	Rutan Pangkajene	-	31	23	-	-	-	32	-	-	-	21	1	-	54
17	Rutan Pinrang	1	19	33	-	-	-	37	-	-	-	13	3	-	53
18	Rutan Sidrap	2	21	24	-	-	-	28	-	-	1	16	2	-	47
19	Rutan Watansoppeng	-	20	15	-	-	-	20	-	-	-	13	2	-	35
20	Rutan Jeneponto	1	26	20	-	-	-	29	-	-	-	15	3	-	47
21	Rutan Bantaeng	1	21	15	-	-	-	24	-	-	1	10	2	-	37
22	Rutan Selayar	-	25	27	1	-	-	37	-	-	1	15	-	-	53
23	Rutan Sinjai	-	29	17	-	-	-	28	1	-	-	14	3	-	46
24	Rutan Sengkang	1	24	27	-	-	-	29	-	-	-	19	4	-	52
25	Rutan Malino	1	12	9	-	-	-	11	-	-	1	8	2	-	22
26	Rutan Masamba	2	15	30	-	-	-	35	-	-	1	9	2	-	47
27	Rupbasan Makassar	1	22	13	-	-	-	15	-	-	1	15	5	-	36



NO	UNIT/SATKER	JUMLAH PEGAWAI				TINGKAT PENDIDIKAN									JML
		GOLONGAN				SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
		IV	III	II	I										
28	Kanim Makassar	3	92	12	-	-	-	13	-	-	6	74	12	2	107
29	Rudenim Makassar	1	16	35	-	-	-	35	-	-	1	11	5	-	52
30	BHP Makassar	6	22	2	-	-	-	3	-	-	1	16	10	-	30
31	Lapas Takalar	3	47	44	-	-	-	50	-	-	1	39	4	-	94
32	Lapas Wanita Sungguminasa	-	25	57	-	-	-	51	-	-	1	29	1	-	82
33	Kanim Parepare	-	39	6	-	-	-	9	-	-	3	31	2	-	45
34	Kanim Palopo	-	30	4	-	-	-	1	-	-	-	30	3	-	34
TOTAL		98	1271	936	1	0	0	1131	1	0	55	923	186	2	2306

Sumber : Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga , data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan



Tabel 5 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

	UNIT/SATKER	PEJABAT ESELON										JABATAN KOSONG
		I		II		III		IV		V		
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kanwil Sulawesi Selatan	-	-	1	4	7	-	18	-	-	-	-
2	LP Makassar	-	-	-	1	-	5	-	9	-	-	2
3	Bapas Makassar	-	-	-	-	1	-	-	-	9	-	3
4	Rutan Makassar	-	-	-	-	-	1	-	3	6	-	-
5	Rutan Masamba	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
6	Rudenim Makassar	-	-	-	-	1	-	-	4	9	-	-
7	Rutan Sidrap Rappang	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
8	LP Takalar	-	-	-	-	-	1	-	2	6	-	1
9	Rutan Sinjai	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
10	Bapas Palopo	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
11	LP Maros	-	-	-	-	1	-	5	-	8	-	-
12	Rutan Sengkang	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
13	LP Wanita Sungguminasa	-	-	-	-	-	-	4	-	8	-	2
14	Rutan Pangkajene	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
15	Rutan Pinrang	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
16	Rutan Enrekang	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
17	LP Bulukumba	-	-	-	-	1	-	5	-	8	-	-
18	LP Watampone	-	-	-	-	1	-	4	-	8	-	1
19	LP Anak Parepare	-	-	-	-	-	1	-	3	7	-	1
20	Rutan Selayar	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
21	Rutan Jeneponto	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
22	LP Palopo	-	-	-	-	1	-	5	-	8	-	-
23	Rutan Watansopeng	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
24	Rutan Makale	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
25	Rupbasan Makassar	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-



1	UNIT/SATKER	PEJABAT ESELON										JABATAN KOSONG
		I		II		III		IV		V		
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
26	LP Sungguminasa Narkotika	-	-	-	-	1	-	5	-	8	-	-
27	Bapas Watampone	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
28	Rutan Bantaeng	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
29	Rutan Malino	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
30	Rutan Barru	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
31	BHP Makssar	-	-	-	-	1	6	3	-	3	-	1
32	Kanim Makassar	-	-	-	-	1	-	5	-	10	-	1
33	Kanim Parepare	-	-	-	-	-	1	-	4	9	-	-
34	Kanim Palopo	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
TOTAL		0	0	1	5	16	15	72	25	158	-	16

Sumber : Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 6 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT/SATKER	JENIS KELAMIN				JML
		P	%	W	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kanwil	100	57	74	43	174
2	LP Makassar	119	81	28	19	147
3	LP Watampone	95	81	22	19	117
4	LP Pare-pare	55	81	13	19	68
5	LP Bulukumba	74	87	11	13	85
6	LP Narkotika	111	90	13	10	124
7	LP Maros	73	87	11	13	84
8	LP Palopo	78	94	5	6	83
9	Bapas Makassar	55	67	27	33	82
10	Bapas Watampone	41	73	15	27	56
11	Bapas Palopo	14	67	7	33	21



NO	UNIT/SATKER	JENIS KELAMIN				JML
		P	%	W	%	
1	2	3	4	5	6	7
12	Rutan Makassar	141	79	38	21	179
13	Rutan Barru	37	88	5	12	42
14	Rutan Enrekang	31	86	5	14	36
15	Rutan Makale	30	86	5	14	35
16	Rutan Pangkajene	46	85	8	15	54
17	Rutan Pinrang	46	86	7	13	53
18	Rutan Sidrap	42	89	5	11	47
19	Rutan Watansoppeng	29	83	6	17	35
20	Rutan Jeneponto	38	81	9	19	47
21	Rutan Bantaeng	33	89	4	11	37
22	Rutan Selayar	43	81	10	19	53
23	Rutan Sinjai	40	87	6	13	46
24	Rutan Sengkang	44	85	8	15	52
25	Rutan Malino	19	86	3	14	22
26	Rutan Masamba	39	83	8	17	47
27	Rupbasan Makassar	25	69	11	31	36
28	Kanim Makassar	61	57	46	43	107
29	Rudenim Makassar	40	77	12	23	52
30	BHP Makassar	17	57	13	43	30
31	Lapas Takalar	83	88	11	12	94
32	Lapas Wanita Sungguminasa	25	30	57	70	82
33	Kanim Parepare	33	73	12	27	45
34	Kanim Palopo	31	91	3	9	34
JUMLAH		1788	78	518	22	2306

Sumber : Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

Formasi

Formasi adalah penentu jumlah dan susunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokoknya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari, kerap ditemukan berbagai kendala yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, sehingga



dibutuhkan penambahan jumlah pegawai melalui pelaksanaan penerimaan ASN. Adapun kebutuhan pegawai sesuai dengan tabel 7:

Tabel 7 Jumlah Kebutuhan Pegawai

NO	UPT/ SATKER	KEBUTUHAN PEGAWAI	PEGAWAI YANG ADA	KEKURANGAN PEGAWAI
1	Kanwil	184	174	10
2	LP Makassar	174	147	27
3	LP Watampone	137	117	20
4	LP Pare-pare	160	68	92
5	LP Bulukumba	113	85	28
6	LP Narkotika	175	124	51
7	LP Maros	134	84	50
8	LP Palopo	150	83	67
9	Bapas Makassar	102	82	20
10	Bapas Watampone	60	56	4
11	Bapas Palopo	50	21	29
12	Rutan Makassar	220	179	41
13	Rutan Barru	67	42	25
14	Rutan Enrekang	56	36	20
15	Rutan Makale	45	35	10
16	Rutan Pangkajene	70	54	16
17	Rutan Pinrang	73	53	20
18	Rutan Sidrap	73	47	26
19	Rutan Watansoppeng	60	35	25
20	Rutan Jeneponto	62	47	15
21	Rutan Bantaeng	46	37	9
22	Rutan Selayar	60	53	7
23	Rutan Sinjai	70	46	24
24	Rutan Sengkang	122	52	70
25	Rutan Malino	45	22	23
26	Rutan Masamba	77	47	30
27	Rupbasan Makassar	36	36	0
28	Kanim Makassar	123	106	16
29	Rudenim Makassar	75	52	23
30	BHP Makassar	45	31	15
31	Lapas Takalar	100	94	6
32	Lapas Wanita Sungguminasa	102	82	20
33	Kanim Parepare	55	45	10
34	Kanim Palopo	39	34	5
Total		3091	2313	779



Sumber : Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

Dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, Kantor Wilayah melalui subbbagian kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga sebagai perantara antara BPSDM Hukum dan HAM maupun Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara dengan peserta diklat. Adapun data pegawai dalam lingkungan kantor wilayah yang mengikuti diklat hingga Triwulan III tahun 2019 adalah :

Tabel 8 Pegawai yang Mengikuti Diklat

No	NAMA DIKLAT	PENYELENGGARA	PESERTA	WAKTU	LOKASI
1	Diklat Bendaharawan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	3 Orang	07 Juli s/d 12 Juli 2019	Hotel Mels In Manado
2	Pelatihan Teknis Pengamanan Kepala Regu	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	4 Orang	22 April s/d 28 April 2019	Balai Diklat Agama Manado
3	Pelatihan Teknis Pengamanan Penjaga Pintu Utama	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	4 Orang	22 April s/d 28 April 2019	Balai Diklat Agama Manado
4	Pendidikan dan Pelatihan PPNS	BPSDM Hukum dan HAM	2 Orang	11 Maret s/d 10 Mei 2019	Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Megamendung, Bogor
5	Pelatihan Kepemimpinan Tk. III	BPSDM Hukum dan HAM	1 Orang	28 Februari s/d 26 Juli 2019	BPSDM Hukum dan HAM
6	Diklat Terpadu SPPA	BPSDM Hukum dan HAM	1 Orang	13 Maret s/d 28 Maret 2019	Badan Diklat Kejaksaan RI Jakarta
7	Pelatihan Teknis Pengamanan Penjaga Pintu Utama	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	3 Orang	20 Maret s/d 26 Maret 2019	Hotel Gran Central Manado
8	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan	BPSDM Hukum dan HAM	2 Orang	17 Juni s/d 06 Juli 2019	BPSDM Hukum dan HAM
9	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan	BPSDM Hukum dan HAM	1 Orang	08 Juli s/d 27 Juli 2019	BPSDM Hukum dan HAM
10	Pelatihan Kepemimpinan Tk. III	BPSDM Hukum dan HAM	2 Orang	08 Juli s/d 25 Oktober 2019	BPSDM Hukum dan HAM
11	Diklat Terpadu SPPA	BPSDM Hukum dan HAM	1 Orang	18 Juni s/d 03 juli 2019	Badan Diklat Kejaksaan RI Jakarta
12	Pelatihan Kepemimpinan Tk. III	BPSDM Hukum dan HAM	1 Orang	11 April s/d 30 juli 2019	BPSDM Hukum dan HAM
13	Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV	BPSDM Hukum dan HAM	1 Orang	08 April s/d 09 Agustus 2019	BPSDM Hukum dan HAM
14	Pendidikan dan Pelatihan PPNS	BPSDM Hukum dan HAM	1 Orang	01 Juli s/d 30 Agustus 2019	Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Megamendung, Bogor
15	Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum	BPSDM Hukum dan HAM	1 Orang	02 Juli s/d 29 Juli 2019	BPSDM Hukum dan HAM
16	Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	3 Orang	28 Juli s/d 03 Agustus 2019	Hotel Gran Central Manado



No	NAMA DIKLAT	PENYELENGGARA	PESERTA	WAKTU	LOKASI
17	Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar	BPSDM Hukum dan HAM	1 Orang	05 Agustus s/d 05 September 2019	Pusat Diklat Intelkam Polri Soreang Bandung
18	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan	BPSDM Hukum dan HAM	2 Orang	19 Agustus s/d 07 September 2019	BPSDM Hukum dan HAM
19	Pelatihan Bendaharawan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	4 Orang	25 Agustus s/d 30 Agustus 2019	Hotel Mels In Manado
20	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan	BPSDM Hukum dan HAM	1 Orang	26 Agustus s/d 14 September 2019	BPSDM Hukum dan HAM

Sumber : Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

Sementara untuk pengadaan diklat dengan metode *e-learning* adalah sebagai berikut :

Tabel 9 Pegawai yang mengikuti Diklat dengan metode *e-learning*

No	NAMA DIKLAT	PENYELENGGARA	PESERTA	LOKASI
1	Reformasi Birokrasi	BPSDM Hukum dan HAM	639 Orang	Masing-masing UPT
2	Administrasi Perkantoran Tk. Dasar	BPSDM Hukum dan HAM	638 Orang	Masing-masing UPT
3	Pelayanan Publik Tingkat Dasar	BPSDM Hukum dan HAM	4 Orang	Masing-masing UPT
4	Administrasi Perkantoran Tingkat Lanjutan	BPSDM Hukum dan HAM	4 Orang	Masing-masing UPT
5	Dasar-dasar HAM	BPSDM Hukum dan HAM	7 Orang	Masing-masing UPT
6	Muatan Teknis Substansi Lembaga	BPSDM Hukum dan HAM	4 Orang	Masing-masing UPT

Sumber : Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

3. Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019

Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara memiliki tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milki negara. Pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Program Dukungan Manajemen dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sudah terlaksana dengan baik. Adapun Realisasi Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan hingga Triwulan III (Januari s.d. September) Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan, diuraikan dalam tabel 10 dan 11 sebagai berikut :



Tabel 10 Realisasi Anggaran Hingga Triwulan III (Januari s.d. September) Tahun 2019

No	KODE ESELO N	KODE SATKER R	SATKER	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL BELANJA		
				PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
				(a)	(b)	(c) = (b) : (a)	(d)	(e)	(f) = (e) : (d)	(g)	(h)	(i) = (h) : (g)	(j) = (a) + (d) + (g)	(k) = (b) + (e) + (h)	(l) = (k) : (j)
1	01	408773	Kanwil Sulawesi Selatan (SEKJEN)	10.085.571.000	8.840.329.507	87,65	5.063.224.000	3.584.367.530	70,79			0,00	15.148.795.000	12.424.697.037	82,02
SUB TOTAL (01)				10.085.571.000	8.840.329.507	87,65	5.063.224.000	3.584.367.530	70,79	-	-	0,00	15.148.795.000	12.424.697.037	82,02
2	03	408772	Kanwil Sulawesi Selatan (AHU)	-	-	0,00	3.500.000.000	2.417.327.369	69,07	-	-	0,00	3.500.000.000	2.417.327.369	69,07
3	03	408432	BHP Makassar	1.727.074.000	1.526.080.176	88,36	2.231.258.000	1.401.453.162	62,81	64.000.000	64.000.000	100,00	4.022.332.000	2.991.533.338	74,37
SUB TOTAL (03)				1.727.074.000	1.526.080.176	88,36	5.731.258.000	3.818.780.531	66,63	64.000.000	64.000.000	100,00	7.522.332.000	5.408.860.707	71,90
4	05	408774	Kanwil Sulawesi Selatan (PAS)	-		0,00	874.552.000	702.291.883	80,30			0,00	874.552.000	702.291.883	80,30
5	05	407072	Bapas Makassar	3.136.409.000	3.987.160.700	127,13	1.032.770.000	750.526.191	72,67			0,00	4.169.179.000	4.737.686.891	113,64
6	05	109144	Bapas Watampone	2.665.912.000	2.510.718.361	94,18	905.446.000	574.431.108	63,44			0,00	3.571.358.000	3.085.149.469	86,39
7	05	407081	LP Makassar	7.008.850.000	6.970.440.365	99,45	9.028.606.000	6.734.520.736	74,59			0,00	16.037.456.000	13.704.961.101	85,46
8	05	407097	Rutan Pangkajene	2.436.189.000	2.456.618.159	100,84	2.804.291.000	2.296.566.527	81,89			0,00	5.240.480.000	4.753.184.686	90,70
9	05	407101	LP Maros	4.077.887.000	3.890.375.323	95,40	3.388.223.000	3.207.741.894	94,67			0,00	7.466.110.000	7.098.117.217	95,07
10	05	407117	LP Takalar	4.241.798.000	4.362.232.321	102,84	4.353.813.000	3.703.579.807	85,07			0,00	8.595.611.000	8.065.812.128	93,84
11	05	407123	Rutan Jeneponto	2.599.643.000	2.372.606.964	91,27	1.407.163.000	1.094.805.790	77,80	18.757.649.000	8.364.275.775	44,59	22.764.455.000	11.831.688.529	51,97



Laporan Triwulan III Tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

12	05	407132	Rutan Selayar	2.000.418.000	2.173.809.021	108,67	1.203.309.000	957.036.058	79,53			0,00	3.203.727.000	3.130.845.079	97,73
13	05	407148	Rutan Bantaeng	2.006.161.000	1.951.003.131	97,25	1.803.459.000	1.404.245.620	77,86			0,00	3.809.620.000	3.355.248.751	88,07
14	05	407154	LP Bulukumba	5.474.783.000	4.490.380.601	82,02	3.485.946.000	2.784.272.910	79,87			0,00	8.960.729.000	7.274.653.511	81,18
15	05	407163	Rutan Malino	1.180.506.000	1.035.560.920	87,72	1.099.357.000	759.433.072	69,08			0,00	2.279.863.000	1.794.993.992	78,73
16	05	407179	Rutan Sinjai	3.058.691.000	2.332.662.390	76,26	1.846.242.000	1.525.330.778	82,62			0,00	4.904.933.000	3.857.993.168	78,66
17	05	407185	LP Palopo	4.386.030.000	3.974.534.227	90,62	6.466.857.000	5.563.624.065	86,03			0,00	10.852.887.000	9.538.158.292	87,89
18	05	407191	Rutan Makale	2.216.062.000	1.743.865.702	78,69	1.625.933.000	1.415.127.341	87,03			0,00	3.841.995.000	3.158.993.043	82,22
19	05	407205	Rutan Masamba	2.486.630.000	2.073.610.130	83,39	3.423.216.000	2.521.274.951	73,65			0,00	5.909.846.000	4.594.885.081	77,75
20	05	407211	LP Anak Pare-Pare	3.637.279.000	3.272.728.536	89,98	5.276.580.000	4.206.659.091	79,72			0,00	8.913.859.000	7.479.387.627	83,91
21	05	407230	Rutan Pinrang	2.382.346.000	2.349.354.729	98,62	4.126.390.000	3.499.530.117	84,81			0,00	6.508.736.000	5.848.884.846	89,86
22	05	407236	Rutan Sidrap Rappang	2.374.476.000	2.172.604.046	91,50	4.144.908.000	2.982.405.320	71,95			0,00	6.519.384.000	5.155.009.366	79,07
23	05	407242	Rutan Enrekang	1.676.081.000	1.677.639.429	100,09	2.221.780.000	1.852.912.076	83,40			0,00	3.897.861.000	3.530.551.505	90,58
24	05	407251	Rutan Barru	2.234.169.000	1.993.961.541	89,25	2.362.839.000	2.102.974.958	89,00			0,00	4.597.008.000	4.096.936.499	89,12
25	05	407302	LP Watampone	6.471.486.000	5.485.159.474	84,76	5.317.380.000	2.994.983.583	56,32			0,00	11.788.866.000	8.480.143.057	71,93
26	05	407318	Rutan Sengkang	2.660.244.000	2.328.819.149	87,54	3.157.987.000	2.665.635.309	84,41			0,00	5.818.231.000	4.994.454.458	85,84
27	05	407324	Rutan Watansoppeng	1.945.126.000	1.680.075.029	86,37	1.785.361.000	1.262.696.992	70,73			0,00	3.730.487.000	2.942.772.021	78,88
28	05	497821	LP Wanita Sungguminasa	3.953.726.000	3.365.068.886	85,11	2.186.606.000	1.878.353.646	85,90			0,00	6.140.332.000	5.243.422.532	85,39
29	05	526793	Rutan Makassar	9.247.294.000	8.281.522.560	89,56	16.993.230.000	13.576.577.656	79,89			0,00	26.240.524.000	21.858.100.216	83,30
30	05	626122	Rupbasan Makassar	1.702.965.000	1.591.942.500	93,48	421.849.000	284.824.539	67,52			0,00	2.124.814.000	1.876.767.039	88,33



31	05	653044	LP Narkotika Sungguminasa	4.978.673.000	5.281.832.676	106,09	8.041.328.000	6.456.935.010	80,30			0,00	13.020.001.000	11.738.767.686	90,16
32	05	653154	Bapas Palopo	1.111.099.000	1.008.489.933	90,77	989.936.000	721.506.705	72,88			0,00	2.101.035.000	1.729.996.638	82,34
SUB TOTAL (05)				93.350.933.000	86.814.776.803	93,00	101.775.357.000	80.480.803.733	79,08	18.757.649.000	8.364.275.775	0,00	213.883.939.000	175.659.856.311	82,13
33	06	408775	Kanwil Sulawesi Selatan (IMIGRASI)	-		0,00	967.900.000	658.553.037	68,04	120.100.000	119.317.500	99,35	1.088.000.000	777.870.537	71,50
34	06	408216	Kanim Makassar	5.195.842.000	5.054.666.811	97,28	6.339.714.000	4.014.934.094	63,33	351.539.000		0,00	11.887.095.000	9.069.600.905	76,30
35	06	409001	Kanim Pare-Pare	2.427.005.000	2.096.738.251	86,39	3.750.335.000	2.906.426.640	77,50	753.615.000	498.438.305	66,14	6.930.955.000	5.501.603.196	79,38
36	06	664675	Rudenim Makassar	1.596.623.000	1.882.944.878	117,93	2.641.467.000	1.929.090.880	73,03	3.721.122.000	1.841.591.800	49,49	7.959.212.000	5.653.627.558	71,03
37	06	418937	Kanim Palopo	1.026.123.000	1.354.598.860	132,01	2.483.200.000	1.953.309.700	78,66	1.132.757.000	1.129.159.000	99,68	4.642.080.000	4.437.067.560	95,58
SUB TOTAL (06)				10.245.593.000	10.388.948.800	101,40	16.182.616.000	11.462.314.351	70,83	6.079.133.000	3.588.506.605	59,03	32.507.342.000	25.439.769.756	78,26
38	07	408776	Kanwil Sulawesi Selatan (HAKI)			0,00	198.057.000	172.436.750	87,06			0,00	198.057.000	172.436.750	87,06
SUB TOTAL (07)				-	-	0,00	198.057.000	172.436.750	87,06	-	-	0,00	198.057.000	172.436.750	87,06
39	08	408777	Kanwil Sulawesi Selatan (PP)			0,00	158.591.000	109.265.500	68,90			0,00	158.591.000	109.265.500	68,90
SUB TOTAL (08)				-	-	0,00	158.591.000	109.265.500	68,90	-	-	0,00	158.591.000	109.265.500	68,90
40	09	408778	Kanwil Sulawesi Selatan (HAM)			0,00	281.828.000	215.036.000	76,30			0,00	281.828.000	215.036.000	76,30
SUB TOTAL (09)				-	-	0,00	281.828.000	215.036.000	76,30	-	-	0,00	281.828.000	215.036.000	76,30
41	10	408779	Kanwil Sulawesi Selatan			0,00	2.430.030.000	1.386.278.500	57,05				2.430.030.000	1.386.278.500	57,05



			(BPHN)												
SUB TOTAL (10)				-	-	0,00	2.430.030.000	1.386.278.500	57,05	-	-	0,00	2.430.030.000	1.386.278.500	57,05
42	11	408780	Kanwil Sulawesi Selatan (Balitbang HAM)			0,00	40.279.000	40.211.000	99,83			0,00	40.279.000	40.211.000	99,83
SUB TOTAL (11)				-	-	0,00	40.279.000	40.211.000	99,83	-	-	0,00	40.279.000	40.211.000	99,83
TOTAL				115.409.171.000	107.570.135.286	93,21	131.861.240.000	101.269.493.895	76,80	24.900.782.000	12.016.782.380	48,26	272.171.193.000	220.856.411.561	81,15

Sumber : Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan



Tabel 11 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Hingga Triwulan III

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	115.409.171.000	107.570.135.286	93,21
2	Belanja Barang	131.861.240.000	101.269.493.895	76,80
3	Belanja Modal	24.900.782.000	12.016.782.380	48,26
TOTAL		272.171.193.000	220.856.411.561	81,15

Sumber : Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

4. Laporan SAI (SAK dan SIMAK-BMN)

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) telah dilaksanakan dan dikelola dengan baik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 12 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

NO	SEKTOR PNBP	TRIWULAN I (JANUARI S.D. MARET)	TRIWULAN II (APRIL S.D. JUNI)	TRIWULAN III (JULI S.D. SEPTEMBER)
1.	UPT Keimigrasian	Rp. 9,071,348	Rp. 9.400.410	Rp. 9.241.016
2.	UPT Pemasarakatan	Rp. 60,377,980	Rp. 129.810.472	Rp. 41.177.723
3.	BHP	-	-	
4.	Kantor Wilayah	Rp. 7.512.000	Rp. 6.284.000	Rp. 7.235.000
Subtotal Pertriwulan		Rp 76.961.328	Rp 145.494.882	Rp. 57.653.739
TOTAL		Rp. 280.109.949		

Sumber : Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN , data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

B. DIVISI PEMASYARAKATAN

Divisi Pemasarakatan terdiri atas dua bidang. Yakni Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Barang Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan,



perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Serta Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

1. Pelayanan Tahanan

Dalam proses pra adjudikasi, seorang tahanan yang didakwa melakukan pelanggaran hukum, diperlakukan berdasarkan prinsip praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Penempatan seorang tahanan harus dipisahkan dengan orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan (Narapidana). Beberapa bangunan Lapas yang ada saat ini, selain berfungsi sebagai tempat pembinaan (LAPAS), juga berfungsi sebagai Rumah Tahanan (Rutan). Kondisi yang demikian menyebabkan kondisi Lapas melebihi daya tampung (Over Kapasitas) penghuni dan tidak optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Keadaan Jumlah Penghuni NAPI/ Tahanan

Data Napi / Tahanan di Triwulan III Tahun 2019 pada tabel 13 berikut :

Tabel 13 Data Napi/Narapidana pada Satuan Kerja

NO	UPT	KAP	NAPI		TAHANAN		JML NAPI/ TAHANAN	% HUNIAN	% OVER KAPASITAS
			L	P	L	P			
1	LAPAS KELAS I MAKASSAR	740	861	0	54	0	915	124	24
2	LAPAS KELAS II A BULUKUMBA	300	282	19	85	5	391	130	30
3	LAPAS KELAS II A MAROS	250	485	15	113	10	623	249	149
4	LAPAS KELAS II A PALOPO	395	678	25	84	18	795	201	101
5	LAPAS KELAS II A WATAMPONE	450	275	19	91	12	397	88	-
6	LAPAS KELAS II B TAKALAR	250	459	13	42	3	517	206	106
7	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A SUNGGUMINASA	360	1050	0	9	0	1059	294	194
8	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA	248	0	257	0	6	263	106	6
9	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PARE-PARE	360	427	34	73	9	543	151	51



NO	UPT	KAP	NAPI		TAHANAN		JML NAPI/ TAHANAN	% HUNIAN	% OVER KAPASITAS
			L	P	L	P			
10	RUTAN KELAS I MAKASSAR	1000	456	42	1763	140	2402	240	140
11	RUTAN KELAS II B BANTAENG	62	114	7	29	1	151	244	144
12	RUTAN KELAS II B BARRU	112	173	8	21	1	203	181	81
13	RUTAN KELAS II B ENREKANG	85	144	15	13	0	172	202	102
14	RUTAN KELAS II B JENEPONTO	44	72	6	75	2	155	352	252
15	RUTAN KELAS II B MAKALE	47	120	8	67	10	205	436	336
16	RUTAN KELAS II B MALINO	50	88	0	0	0	88	176	76
17	RUTAN KELAS II B MASAMBA	225	244	11	100	2	357	159	59
18	RUTAN KELAS II B PANGKAJENE	123	245	10	74	1	330	268	168
19	RUTAN KELAS II B PINRANG	220	220	21	193	9	443	201	101
20	RUTAN KELAS II B SELAYAR	110	73	7	19	0	99	90	-
21	RUTAN KELAS II B SENGGANG	200	235	12	105	2	354	177	77
22	RUTAN KELAS II B SIDENRENG RAPANG	140	301	16	85	4	406	290	190
23	RUTAN KELAS II B SINJAI	100	119	4	53	2	178	178	78
24	RUTAN KELAS II B WATANSOPPENG	62	112	7	45	3	167	269	169
TOTAL		5933	7233	556	3193	240	11222	189	89

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara , data diolah oleh Divisi Pemasyarakatan

2. Pembinaan Narapidana

Data Pemberian PB, CB dan CMB pada Lapas/ Rutan se-wilayah Sulawesi Selatan.

Tabel 14 Data Pemberian PB, CB, dan CMB

NO	BULAN	PEMBERIAN HAK-HAK WBP		
		PB	CB	CMB
1	2	3	4	5
1	Juli	4	1	-
2	Agustus	18	-	-



NO	BULAN	PEMBERIAN HAK-HAK WBP		
		PB	CB	CMB
3	September	26	3	-
TOTAL		48	4	0

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara , data diolah oleh Divisi Pemasyarakatan

3. Pembinaan Klien

Keadaan klien Pemasyarakatan pada Bapas se-Sulawesi Selatan dirinci berdasarkan klasifikasinya pada tabel berikut:

Tabel 15 Keadaan Klien Pemasyarakatan

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Anak yang diputus hakim untuk dipulangkan ke Orang Tua/ Wali	11	
2	Anak yang diputus Hakim menjadi Anak Negara (AN)	-	
3	Pidana Bersyarat	5	
4	Pembebasan Bersyarat (PB)	994	
5	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	-	
6	Cuti Bersyarat (CB)	319	
7	Litmas untuk Pengadilan Negeri	95	
8	Litmas untuk Pembinaan Luar Lapas	-	
9	Litmas untuk Pembinaan Dalam Lapas	918	
10	Sidang Anak Pengadilan Negeri	74	
11	Anak Asuhan	-	
12	Asimilasi	35	
TOTAL		2451	

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan , data diolah oleh Divisi Pemasyarakatan

4. Perawatan Basan/ Barang

Untuk kepentingan proses peradilan, barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan disita dan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Makassar (Terlampir).



C. DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Divisi Keimigrasian terdiri dari dua bidang. Yakni Bidang Intelijen dan Penindakan yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Serta Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian yang memiliki tugas melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Keimigrasian berkoordinasi dengan empat UPT Keimigrasian yang ada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, yakni Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo, dan Rumah Detensi Imigrasi Makassar. Adapun pelaksanaan tugas dari Divisi Keimigrasian adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan SPRI

Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atau biasa disebut Paspor adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sebagai dokumen resmi yang harus dimiliki oleh seluruh Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. SPRI terdapat dua jenis, yakni paspor 24 Halaman dan 48 halaman. Adapun jumlah permohonan paspor pada periode Triwulan III adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Pemberian Paspor RI

NO	UNIT PELAKSANA TUGAS	PASPOR	
		24 HALAMAN	48 HALAMAN
1.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	3	13.354
2.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	152	8.842
3.	Kantor Imigrasi Kelas III Palopo	-	2.606
JUMLAH		155	24.802

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi , data diolah oleh Divisi Keimigrasian

2. Pelayanan ITAS/ ITAP

Selain pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri, Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah juga memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada Warga Negara Asing dari berbagai kebangsaan melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare dan Kantor Imigrasi Kelas III Palopo terkait



ijin tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia. Adapun pelayanan yang dilakukan selama Triwulan III Tahun 2019 periode Juli s.d. September adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Pelayanan ITAS/ITAP

NO	UNIT/ SATKER	PELAYANAN					KET.
		ITK	ITAS	PERPANJANG ITAS	ITAP	PERPANJANG ITAP	
1.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	496	172	19	-	-	
2.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	30	5	5	1	-	
3.	Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Palopo	49	-	-	-	-	
TOTAL		575	177	24	0	0	

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi , data diolah oleh Divisi Keimigrasian

3. Lalulintas Orang Asing

Data lalu lintas orang (WNI dan WNA) dari dan ke luar negeri melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) laut dan udara di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia

Lalu lintas WNI dari dan ke luar negeri melalui Laut/ Udara sebanyak **71.501** orang.

2. Warga Negara Asing

Lalu lintas WNA dari dan ke luar negeri melalui Laut/ Udara sebanyak **14.244** orang.

Tabel 18 Data Lalu Lintas Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Kegiatan	Triwulan II Tahun 2019	
	Makassar	Pare-Pare
KAPAL		
Kapal Datang		
- Crew WNI	563	60
- Crew WNA	969	294
- Penumpang WNI		
- Penumpang WNA		
Kapal Berangkat		
- Crew WNI	775	60
- Crew WNA	1.146	294
- Penumpang WNI	92	4
- Penumpang WNA		98
PESAWAT		
Pesawat Datang		
- Crew WNI	905	
- Crew WNA	459	
- Penumpang WNI	32.767	
- Penumpang WNA	5.247	
Pesawat Berangkat		



Kegiatan	Triwulan II Tahun 2019	
	Makassar	Pare-Pare
- Crew WNI	908	
- Crew WNA	465	
- Penumpang WNI	35.367	
- Penumpang WNA	5.272	
PLB / BCC		
Crew Pas / CCC		
Total	42.012	

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi , data diolah oleh Divisi Keimigrasian

4. Pengawasan

Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian selama Triwulan III Tahun 2019, telah dilakukan pedetensian, pemindahan, pemulangan/pengungsian/pendeportasian Warga Negara Asing dari berbagai kebangsaan pada periode Triwulan III (Juli s.d. September) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 19 Pengungsi di Dalam Rudenim

NO.	STATUS	ASAL NEGARA DETENI	Juli		Agustus		September	
			L	P	L	P	L	P
1.	Pedetensian	Afganistan	7	-	7	-	33	-
		Thailand	-	-	-	-	-	-
		Palestina	-	-	-	-	-	-
		Myanmar	3	-	1	-	1	-
		Yaman	1	-	1	-	1	-
		Iran	-	-	-	-	1	-
2.	Pemindahan	Myanmar	7	6	-	-	1	-
		Afganistan	3	-	17	12	2	2
		Somalia	1	2	-	-	-	-
		Irak	-	-	2	1	-	-
		Pakistan	3	3	-	-	-	-
		Ethopia	-	-	-	-	1	-
3.	Pendeportasian	-	-	-	-	-	-	
Total			24	11	28	13	40	2

Sumber : Rumah Detensi Imigrasi , data diolah oleh Divisi Keimigrasian

Warga Negara Asing yang terbukti melanggar izin masuk maupun izin tinggal yang diberikan kepadanya akan ditahan di Rumah Detensi Imigrasi. Namun, karena keterbatasan tempat dan daya tampung dari Rudenim, maka beberapa pengungsi akan ditempatkan di luar Rudenim, yakni pada *Community House* yang tersebar di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya, namun tetap dalam pengawasan dari Rudenim Makassar. Adapun data pengungsi yang ada di luar Rudenim seperti pada tabel 20 :



Tabel 20 Pengungsi di luar Rudenim

NO	NAMA PENGINAPAN	NEGARA ASAL																TOTAL
		AFG	MMR	SOM	SDN	IRN	IRQ	PAK	LKA	ETH	PSE	YEM	ERI	EGY	SYR	NPL	IND	
1	IDC Makassar	32	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	34
2	Police Custody	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	155 Guesthouse - A	36	-	5	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	46
4	155 Guesthouse - B	42	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
5	155 Guesthouse - C	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
6	155 Guesthouse - D	67	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	72
7	Bugis House	97	2	15	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
8	D'Win Homestay	1	-	12	4	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	20
9	Ida Guesthouse 2	46	-	18	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
10	Kirani Guesthouse	72	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	76
11	Pondok Elite - A	39	-	1	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
12	Pondok Elite - B	45	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
13	Pondok Maryam	13	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
14	Pondok Nugraha	85	4	22	19	14	13	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	161
15	Pondok Re-Re	97	22	13	8	2	-	16	-	1	-	1	-	1	-	-	-	161
16	Pondok Reski Jaya	69	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
17	Pondok Yaspis	28	2	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	35
18	Wisma Bajirupa	30	17	10	-	2	11	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	72
19	Wisma Budi	-	24	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	26
20	Wisma Bungaya (Mustika-I)	20	14	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	41
21	Wisma D'Khanza	21	16	2	2	4	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	50
22	Wisma Favorite	30	11	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
23	Wisma KPI	78	12	15	2	2	4	1	3	-	7	-	-	-	-	-	-	124
24	Wisma MSM	11	21	10	1	7	5	-	12	5	-	-	-	-	-	-	-	72
25	Wisma Maysara	90	14	6	2	5	9	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	134
26	Wisma Mustika 2	32	-	-	2	5	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	45
27	Wisma Mustika 3	40	6	-	8	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
	TOTAL	1,142	176	143	66	53	43	34	28	25	8	5	1	1	-	-	-	1,725

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Rumah Detensi Imigrasi , data diolah oleh Divisi Keimigrasian.

5. Tindakan Administratif dan Penegakan Hukum Keimigrasian

Kantor Wilayah melalui upt keimigrasian memiliki tugas untuk memberikan tindakan administratif dan penegakan hukum keimigrasian bagi pelanggar hukum keimigrasian. Adapun tindakan administrasi dan penegakan hukum keimigrasian yang dilaksanakan pada periode Triwulan III (Juli s.d. September) dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 21 Tindakan Administrasi dan Penegakan Hukum Keimigrasian

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR	5	3	2
2	RUMAH DETENSI IMIGRASI	5	2	1
3	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI PAREPARE	-	1	-
4	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PALOPO	-	1	-
	TOTAL	10	7	3

Sumber: Subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

D. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah terdiri atas tiga bidang. Yakni, Bidang Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyediaan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Yang kedua, Bidang HAM yang memiliki tugas pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrument hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Serta Bidang Pelayanan Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum (bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik) dan kekayaan intelektual. Adapun pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan Hukum selama periode triwulan III yakni :



1. Pelayanan Kewarganegaraan

Pelayanan kewarganegaraan yang dilayani adalah permohonan Warga Negara Asing untuk menjadi Warga Negara Indonesia. Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, pada periode Triwulan III Tahun 2019 permohonan kewarganegaraan yang ada sesuai dengan tabel 22:

Tabel 22 Jenis Pelayanan Kewarganegaraan

NO	JENIS	PERMOHONAN	PNBP	KET.
NIHIL				

Sumber : Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

2. Pelayanan HKI

Dapat dilihat jumlah permohonan di bidang HKI masing-masing pada tabel 23:

Tabel 23 Permohonan HKI

NO	JENIS	JUMLAH PERMOHONAN			JUMLAH PER JENIS
		Juli	Agustus	September	
1.	Merk	24	35	37	96
2.	Hak Cipta	0	2	4	6
3.	Paten & Paten Sederhana	2	1	3	6
4.	Desain Industri	0	0	0	0
5.	Indikasi Geografis	0	0	0	0
6.	Lain-lain (Perpanjangan Merek, Pemeriksaan Substantif, Paten, Perubahan Data Pemilik Merek)	1	0	1	2
JUMLAH		27	38	45	110

Sumber : Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

3. Pemberian Bantuan Hukum

Negara berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang terjerat masalah hukum. Tugas tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah melalui Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum yang ada. Adapun bantuan hukum yang telah dilakukan hingga triwulan III tahun 2019 baik litigasi maupun nonlitigasi sesuai dengan tabel 24:

Tabel 24 Pemberian Bantuan Hukum

NO	ORGANISASI BANTUAN HUKUM	JENIS BANTUAN	
		LITIGASI	NON LITIGASI
1	YLBHI LBH Makassar	12	7
2	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan	16	4



	(LBH APIK) Makassar		
3	Lembaga Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LKABH-UMI)	24	1
4	PUSBAKUMADIN Jeneponto	28	3
5	Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sulsel	27	0
6	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar	31	3
7	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Justice (YLBHI-Justice) Rakyat Makassar	17	0
8	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan	77	26
9	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan	34	3
10	Yayasan Rumah Hukum Lasinrang	24	17
11	LBH Bhakti Keadilan Jeneponto	33	5
12	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia	11	0
13	POSBKUMADIN Bulukumba	32	3
14	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang	32	11
15	Lembaga bantuan Hukum Buttatoa Bantaeng	25	3
16	Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar	23	1
17	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara	23	2
18	Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang	24	2
19	LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur	29	7
20	Pos Bantuan Hukum Peradri Pinrang	22	3
TOTAL		544	101

Sumber : Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

4. Penyuluhan dan Sosialisasi Bantuan Hukum

Penyuluhan dan Sosialisasi Bantuan Hukum dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dan HAM Sulawesi Selatan dilaksanakan sesuai dengan tabel 25 :

Tabel 25 Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Bantuan Hukum

NO	KEGIATAN	MATERI	NARASUMBER	LOKASI DAN WAKTU
NIHIL				

Sumber : Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

5. Dokumentasi dan Informasi Hukum (DIH)

Selain penyuluhan dan bantuan hukum, Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH juga memiliki perpustakaan JDIH yang berisi buku-buku terkait dengan hukum, politik, administrasi, dll yang bisa diakses oleh umum. Perpustakaan ini terletak di ruang Subbidang



Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH pada Kantor Wilayah. Adapun jumlah pengunjung perpustakaan sesuai dengan data yang ada pada tabel 26:

Tabel 26 Jumlah Pengunjung

NO	BULAN	JUMLAH PENGUNJUNG
1.	April	24
2.	Mei	11
3.	Juni	10
JUMLAH		45

Sumber : Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

6. Legislasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah berkoordinasi melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diikutsertakan dalam pembahasan Ranperda dan agar setiap Perda maupun Ranperda dikirim ke Kantor Wilayah. Data produk hukum daerah yang pernah dikaji dan diharmonisasi sesuai dengan tabel 27 :

Tabel 27 Data Produk Hukum yang dibahas dan dikaji

NO	NAMA KABUPATEN	NOMOR DAN TENTANG	KET
1	Wajo	Pengelolaan Sumber Data Perikanan Umum dan Daratan	Telah Diharmonisasi 16 Juli 2019
		Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajang Sarang Burung Walet	Telah Diharmonisasi 13 Agustus 2019
2	Enrekang	Pengarusutamaan Gender	Telah Diharmonisasi 30 Juli 2019
		Penanggulangan Penyakit Tuberkolosis di Kabupaten Enrekang	Telah Diharmonisasi 14 Agustus 2019
		Penanggulangan Kemiskinan	Telah Diharmonisasi 15 Agustus 2019
3	Bulukumba	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018	Telah Diharmonisasi 2 Agustus 2019
4	Kota Palopo	Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman	Telah diharmonisasi 5 Agustus 2019
		Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Telah diharmonisasi 6 Agustus 2019
5	Takalar	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Telah Ditanggapi Perancang
		Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin	



Sumber : Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah , data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

7. RANHAM

Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia, yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan merupakan tugas Kantor Wilayah melalui Subbidang Pemajuan HAM adalah menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM melalui Layanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMMAS), sesuai yang telah dijabarkan pada tabel 28 :

Tabel 28 Data Laporan Komunikasi maupun Informasi

NO	PELAYANAN	TINDAK LANJUT	JUMLAH TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	Permohonan Pendampingan dan Mediasi untuk Pengembalian Ijazah S1 yang ditahan oleh PT Bina Artha	Surat Hasil Telaahan	2	1. Rapat Telaahan (25/07/2019) 2. Surat Hasil Telaahan (05/08/2019)
2	Permohonan Pendampingan Hukum mengenai anak yang disembunyikan oleh Bapak Biologisnya dan tidak diketahui keberadaannya	Surat hasil telaahan	2	1. Rapat Telaahan (25/07/2019) 2. Surat Hasil Telaahan (05/08/2019)
3	Penyampai Komunikasi melaporkan dugaan Pelanggaran HAM terkait penahanan ijazah SMP, sehingga anak tersebut tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMA	Klarifikasi Langsung	2	1. Rapat Telaahan (02/08/2019) 2. Koordinasi dan Klarifikasi langsung (19/08/2019)
4	Penyampai Komunikasi melaporkan dugaan pelanggaran HAM terkait pengambilan anak balita oleh suami (ayah kandung)	Surat Koordinasi dengan Tim Yankomas Kanwil Kumham	2	1. Rapat Telaahan (02/08/2019) 2. Surat



NO	PELAYANAN	TINDAK LANJUT	JUMLAH TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		Sultra		Koordinasi ke Kanwil Kumham Sultra (05/08/2019)
5	Penyampai komunikasi melaporkan dugaan pelanggaran HAM dalam hal tindakan memberi nafkah kepada anak kandungnya	Rekomendasi	2	1. Rapat Telaahan (02/08/2019) 2. Koordinasi dan Klarifikasi Langsung (25/09/2019)
6	Keberatan atas penandatanganan LPJ yang dilakukan dalam keadaan terdesak.	Surat Hasil Telaahan	2	1. Rapat Telaahan (02/08/2019) 2. Surat Hasil Telaahan/Analisis (05/08/2019)
7	Konflik Sengketa lahan yang terjadi antara Muh Syarief Karaeng dan PT Telkom	Diarsipkan (ditangani Yankomas Pusat)	1	1. Rapat Telaahan (10/09/2019)
8	Dugaan pelanggaran terkait tidak dilakukannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan register No.13/Pdt.G/1984/PN Pinrang	Surat Rekomendasi penyampaian kepa Ketua Pengadilan Negeri Pinrang	2	1. Rapat Telaahan (10/09/2019) 2. Surat Rekomendasi (17/09/2019)
9	Dugaan Pemanfaatan lahan tanah milik adat yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Makassar tanpa ganti rugi	Surat Koordinasi ke Pemkot Makassar	2	1. Rapat Telaahan (10/09/2019) 2. Surat Koordinasi dan Klasifikasi (17/09/2019)
10	Dugaan Pelanggaran terkait permohonan pengaduan keberatan berupa rekonvensi/sanggahan/eksepsi isi petitum pokok perkara Penyampai komunikasi a.n. Andi Nangnga selaku tergugat kepada gugatan Taufiq Mus Muttaqin selaku Penggugat dalam Register Salinan Putusan Perkara No. 7/Pdt.G/2018/PN Sr yang telah berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar	Diarsipkan (bukan merupakan kewenangan Yankomas)	1	1. Rapat Telaahan (10/09/2019)



NO	PELAYANAN	TINDAK LANJUT	JUMLAH TINDAK LANJUT	KETERANGAN
11	Konflik sengketa lahan yang terjadi antara Yayasan Legiun Veteran RI Markas Cabang Kabupaten Gowa dengan PT.GMTD	Diarsipkan (sudah pernah ditangani Tim Yankomas Sulsel)	1	1. Rapat Telaahan (10/09/2019)
12	Dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Notaris/PPAT Aksal,S.H. di Kabupaten Gowa	Suat Rekomendasi untuk menyampaikan kepada Majelis Kehormatan Notaris Sulsel	2	1. Rapat Telaahan (10/09/2019) 2. Surat Rekomendasi (17/09/2019)
13	Dugaan Pelanggaran HAM mengenai Tindakan Tidak menafkahi anak kandung selama 10 tahun	Surat Koordinasi dan Klarifikasi kepada Kepala Bapas Kelas II Palopo	2	1. Rapat Telaahan (10/09/2019) 2. Surat koordinasi dan klarifikasi (17/09/2019)
14	Penegakan Hukum terhadap pembantaian yang dilakukan oleh Oknum anggota TNI a.n. Peltu TNI Syamsuddin Dg. Sissing terhadap Saharuddin Dg.Kulle	Diarsipkan (Bukan kewenangan Yankomas)	1	1. Rapat Telaahan (10/09/2019)
15	Dugaan Pelanggaran HAM mengenai tindakan penangkapan tidak sesuai prosedur dan penganiayaan menyebabkan kematian yang dilakukan oknum aparat Polres Sinjai dan Resmob Polda Sulsel	Surat Rekomendasi untuk mengajukan pengaduan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Sulsel	2	1. Rapat telaahan (10/09/2019) 2. Surat Rekomendasi (17/09/2019)
16	Dugaan Pelanggaran terkait keberatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan atas jalur kereta api di Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maris yang melewati tanah miliknya selaku ahli waris H. Djumarong	Diarsipkan (surat tembusan)	1	1. Rapat Telaahan (10/09/2019)



NO	PELAYANAN	TINDAK LANJUT	JUMLAH TINDAK LANJUT	KETERANGAN
17	Dugaan Pelanggaran terkait Pengalihan Jaminan Kredit berupa Sertipikat Hak Milik yang dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk tanpa sepengetahuan debitur	Diarsipkan (suat tembusan)	1	1. Rapat Telaahan (10/09/2019)

Sumber Subbidang Pemajuan HAM, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

8. Kajian Permasalahan Hukum dan HAM

Tabel 29 Kajian Permasalahan Hukum dan HAM

NO.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Ket
NIHIL			

9. Kenotariatan dan PPNS

Sampai dengan saat ini jumlah Notaris se Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 447 orang. Dan dalam rangka pembinaan Notaris masih terbatas karena masih minimnya anggaran yang tersedia.

Tabel 30 Daftar Jumlah Notaris di Wilayah Sulawesi Selatan

No	Kota / Kabupaten	Jumlah Notaris
1	Kab. Barru	4
2	Kab. Bantaeng	4
3	Kab. Wajo	10
4	Kab. Gowa	78
5	Kab. Bulukumba	5
6	Kab. Sidrap	11
7	Kab. Pangkep	14
8	Kota Makassar	144
9	Kab. Enrekang	3
10	Kota Palopo	16
11	Kab. Luwu Timur	3
12	Kota Parepare	21
13	Kab. Sinjai	3
14	Kab. Jeneponto	2
15	Kab. Soppeng	4
16	Kab. Luwu utara	2
17	Kab. Bone	23
18	Kab. Toraja Utara	3
19	Kab. Tana Toraja	3
20	Kab. Luwu	5



No	Kota / Kabupaten	Jumlah Notaris
21	Kab. Maros	60
22	Kab. Pinrang	13
23	Kab. Selayar	2
24	Kab. Takalar	22
Jumlah		455

Sumber: Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

Tabel 31 Data Notaris

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Notaris Baru	5
2.	Notaris Pindahan dari luar Sulawesi Selatan	-
3.	Notaris Pengganti	8

Sumber: Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

Tabel 32 Pelantikan Notaris

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pelantikan Notaris Baru	-
2.	Pelantikan Notaris Pengganti	5

Sumber: Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan



6. MASALAH/KENDALA

Pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2019 sampai dengan akhir triwulan III kerap menemui kendala dan masalah yang ditemui. Adapun kendala yang dihadapi setiap divisi adalah sebagai berikut :

A. Divisi Administrasi

1. Bagian Umum

- a. Belum terinventarisasinya Barang Milik Negara dengan baik sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Pengusulan RKBMN Revisi Tahun 2019 banyak yang tidak disetujui terkendala usulan kebutuhan ada yang melebihi SBSK karena banyak barang yang sudah rusak berat tetapi belum dihapuskan;
- c. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran dari beberapa DIPA yang ada di Kantor Wilayah belum memenuhi target nilai yang ditetapkan. Adapun yang mempengaruhi hal tersebut adalah pengelolaan UP yang mengalami keterlambatan dan adanya deviasi antara rencana Halaman III DIPA dan penarikan dana;
- d. Keterbatasan peralatan dalam pelaksanaan tugas, seperti kurangnya jumlah computer, laptop, *Air Conditioner*, Kamera DSLR, *Scanner*, Printer, dan Proyektor.

2. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

- a. Pengumpulan bahan dan data laporan triwulan membutuhkan waktu yang agak lama dikarenakan pengumpulan data mulai dari tingkat UPT;
- b. Berubahnya format data dukung dan pagu anggaran tepat pada saat pelaksanaan Supervisi Pagu Alokasi di Jakarta, sehingga harus menyusun beberapa data dukung dari awal;
- c. Sarana kamera yang kurang mendukung/tipe kamera yang sudah using (model lama);
- d. Peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM yang belum pernah dilaksanakan;
- e. Tidak adanya alokasi anggaran untuk penanganan Teknologi Informasi di Kantor Wilayah;
- f. Kurangnya fasilitas penunjang pekerjaan seperti printer khusus foto untuk mencetak foto-foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan Kantor Wilayah.

B. Divisi Pemasyarakatan

1. Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Kerja Sama

- a. Pada UPT Balai Pemasyarakatan, belum optimalnya Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) terkait klien Bapas dan status klien.



2. Bidang Pelayanan Tahanan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran, dan Keamanan
 - a. Laporan Kegiatan Teknis Subbidang Yantah Watkesrehab yang terdiri dari Laporan Bulanan Watkesrehab, Triwulan TB, Rehabilitasi Narkoba, Layanan Kepribadian, Bantuan Hukum, Penyelenggaraan Bama, dsb. UPT Pemasarakatan slow respon dan lambat dalam mengirim laporan melewati batas pengiriman yang telah ditentukan sehingga dapat memperlambat rekapitulasi laporan kanwil;
 - b. Stok alat tes urine yang menipis dan hampir kadaluarsa;
 - c. Tidak adanya anggaran terkait kegiatan teknis subbidang yantah watkesrehab.

C. Divisi Keimigrasian

1. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
 - a. Belum Optimalnya Koordinasi dengan instansi terkait terutama pada kabupaten/kota mengenai pengawasan orang asing;
 - b. Terhambatnya proses pembuatan surat perintah;
 - c. Kolaborasi dengan Divisi Terkait (monev);
 - d. Kurangnya anggaran pelaksanaan kegiatan;
 - e. Kurangnya SDM pada subbidang penindakan keimigrasian untuk melaksanakan tugas penindakan keimigrasian;
 - f. Tidak tersedianya kendaraan roda empat untuk melakukan pengawasan lapangan.
2. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
 - a. Belum efektifnya aplikasi SIMKIM Versi 2.0 untuk tampilan menu informasi data orang asing pada *e-Office* Divisi Keimigrasian;
 - b. Belum memadainya sarana *e-Office* seperti kurang baiknya kualitas pendinginan pada ruangan server yang disebabkan oleh tidak efektifnya pendinginan oleh mesin AC yang bisa saja berdampak fatal pada alat.

D. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

1. Bidang Hukum
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum melibatkan tenaga perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan Pembinaannya;
 - b. Pemerintah Daerah terkadang kurang memberikan respon yang baik terhadap permintaan data inventarisasi peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;



- c. Minimnya kerja sama daerah dalam memberikan informasi terkait ada tidaknya peraturan daerah yang layak untuk dikaji baik dari segi substansi maupun dari pelaksanaan peraturan daerah, akan tetapi Kantor Wilayah tetap berupaya melakukan kerja sama melalui koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/kota dengan menjelaskan manfaat dari kegiatan tersebut;
 - d. Bahan konsultasi tidak dilengkapi dengan *draft* dan daftar pertanyaan sebagaimana telah disampaikan Kantor Wilayah kepada Pemerintah Kabupaten/kota perihal konsultasi dan mediasi. Konsultasi yang dilakukan seringkali mendadak atau tidak disertai surat pemberitahuan sebelumnya sebagaimana prosedur yang telah ditentukan.
 - e. Masih kurangnya partisipasi pengunjung dalam mengisi buku tamu perpustakaan sehingga kurangnya inventarisasi data pengunjung perpustakaan JDIH.
2. Bidang Pelayanan Hukum
- a. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pada loket pelayanan;
 - b. Sarana dan prasarana untuk menunjang pelaporan pendaftaran KI;
 - c. Banyaknya permintaan data terkait produk jasa hukum yang dilaksanakan oleh Notaris dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (meliputi layanan fidusia, badan hukum, badan usaha, dll) dari masyarakat dan instansi terkait yang masih tersentralisasi di pusat;
 - d. Terdapatnya beberapa Pengadilan negeri yang tak lagi menerima pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) yang akta pendirian dibuat sebelum terbitnya PP 24 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.
3. Bidang Hak Asasi Manusia
- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang HAM selama triwulan III Tahun 2019, belum ditemukan adanya hambatan yang berarti.

7. PEMECAHAN MASALAH

Dengan segala keterbatasan baik sumber daya manusia maupun anggaran, segala kendala dan masalah yang dihadapi dicoba untuk mencari pemecahan yang dapat dilakukan untuk mencegah kendala dan masalah menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi yang bisa berdampak pada kualitas pelayanan Kantor Wilayah. Adapun beberapa pemecahan masalah yang dilakukan oleh setiap divisi adalah :

A. Divisi Administrasi

1. Bagian Umum
 - a. Penataan dan penertiban pengelolaan Barang Milik Negara;
 - b. Telah dilakukan pengusulan penghapusan BMN ke Sekretariat Jenderal;



- c. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Nilai IKPA secara intens sekaligus melakukan langkah-langkah perbaikan seperti : melakukan revisi DIPA secara selektif, meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya (Halaman III DIPA), meningkatkan ketepatan waktu dalam revolving up, serta ketepatan waktu dalam penyampaian LPS Bendahara pengeluaran/penerimaan;
 - d. Perlunya diadakan pengadaan.
2. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
- a. Format data dan bahan laporan triwulan dikirimkan setiap akhir triwulan, dan akan diingatkan pada tanggal 1 setiap awal triwulan, agar laporan triwulan dapat disusun dengan baik dan cepat;
 - b. Penggunaan kamera pribadi yang lebih baik kondisi dan kualitasnya dalam pelaksanaan tugas di lapangan;
 - c. Pegawai diikutkan pelatihan jurnalistik, PR, Teknologi Informasi dan keprotokoleran;
 - d. Memberikan alokasi anggaran untuk penanganan Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah;
 - e. Penambahan printer khusus foto.

B. Divisi Pemasyarakatan

1. Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Kerja Sama
 - a. Agar UPT Bapas mengadakan kordinasi dengan Direktur TI untuk diadakan perbaikan update patch pada SDP fitur Bapas;
2. Bidang Pelayanan Tahanan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran, dan Keamanan
 - a. Untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada UPT untuk meningkatkan kedisiplinan mengirim laporan tepat waktu;
 - b. Karena Pemasyarakatan tidak mempunyai anggaran pembelian tes urine, maka dapat berkoordinasi dengan pusat/Ditjen Pemasyarakatan terkait pengadaan tes urine tersebut;
 - c. Dapat berkolaborasi dengan Subbidang lain di Divisi Pemasyarakatan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi.

C. Divisi Keimigrasian

1. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
 - a. Melaksanakan konsultasi dan kerja sama dengan instansi terkait Orta Baru Divisi Keimigrasian khususnya pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
 - b. Agar Dapat dikoordinasikan dengan kepala Divisi Administrasi;
 - c. Pengusulan anggaran;
 - d. Perlunya penambahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - e. Perlunya pengadaan kendaraan operasional roda empat



2. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
 - a. Telah dilakukan koordinasi dengan pihak Timtik pada Dit Sistik Jakarta;
 - b. Telah dilaporkan ke bagian umum dan telah diadakan beberapa kali perbaikan, namun kondisi mesin pendingin ruangan belum berjalan dengan baik.

D. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

1. Bidang Hukum
 - a. Diperlukan koordinasi pemerintah daerah bersama DPRD dengan pihak fungsional perancang Kantro Wilayah untuk memberikan masukan dan dilibatkan di dalam proses pembentukan peraturan daerah. Selain itu diperlukan peningkatan kompetensi bagi para perancang peraturan perundang-undangan dalam hal pemberian tanggapan dan pengembangan profesi khususnya perancang di wilayah baik dalam bentuk Pendidikan maupun pelatihan;
 - b. Dengan adanya Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Peraturan Daerah dapat membangun sinergitas, kerja sama dan peningkatan koordinasi antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah dalam rangka inventarisasi dan klarifikasi serta pemetaan permasalahan rancangan peraturan daerah ke depannya;
 - c. Dibutuhkan kerja sama yang baik antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut;
 - d. Diharapkan agar pemohon konsultasi mematuhi prosedur permohonan konsultasi yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH.01.PP.05-01 Tahun 2016 tentang Alur Proses Kegiatan Mediasi/Konsultasi.
2. Bidang Pelayanan Hukum
 - a. Perlunya diadakan *Capacity Building* dan penambahan pegawai untuk loket;
 - b. Perlunya pengadaan computer, scanner, printer, dan AC
 - c. Layanan monitoring Kantor Wilayah melalui kanwil.ahu.go.id yang dibuat oleh Direktorat Administrasi Hukum Umum menjadi sarana sangat membantu guna memenuhi permintaan data yang dimaksud;
 - d. Berkonsultasi dengan bagian perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.



BAB III PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan selama Triwulan III Tahun Anggaran 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Divisi Administrasi

Pelaksanaan tugas pada Divisi Administrasi meliputi : Program dan Pelaporan, Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Pengurusan Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga, serta Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara sudah berjalan dengan baik.

2. Divisi Pemasyarakatan

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Divisi Pemasyarakatan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Divisi Imigrasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Divisi Imigrasi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Tugas-tugas dan kegiatan pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sudah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran yang disediakan dalam DIPA tahun 2019.

B. SARAN

1. Divisi Administrasi

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Divisi Administrasi perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang profesional khususnya dalam hal keprotokolan dan Peliputan/ Jurnalis dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Divisi Pemasyarakatan

Dalam Tugas dan fungsi Pemasyarakatan perlu penambahan operator, dan sumber daya anggaran yang memadai, serta pelaksanaan pemindahan Narapidana/ Tahanan harus sesuai dengan Kalender Kerja.

3. Divisi Imigrasi

Divisi Imigrasi yang mempunyai tugas dan fungsi melayani dan mengawasi lalu lintas Orang Asing dari dan keluar Indonesia perlu di dukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berwawasan luas, menguasai bahasa Asing, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.



4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM perlu adanya sarana dan prasarana, serta melakukan koordinasi dan kerjasama secara terus menerus dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Triwulan III Tahun 2019 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, atas perkenaannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Priyadi
NIP. 19630811 198703 1 001